

TANTANGAN DESENTRALISASI ASIMETRIS: STUDI KASUS PROVINSI ACEH

Azharisman Rozie^{1*}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl Raya Jatinangor KM.20, Sumedang, Indonesia

Korespondensi: hhrozie@ipdn.ac.id

Jurnal Politikologi volume 4 nomor 1 Tahun 2021, 30-07-2021

ABSTRAK

Desentralisasi asimetris merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik historis, politik, sosial, budaya, dan geografisnya. Provinsi Aceh merupakan salah satu contoh utama penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan implementasi desentralisasi asimetris di Aceh, khususnya dalam aspek kelembagaan, hubungan pusat–daerah, fiskal, dan politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan kelembagaan, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi kesenjangan antara desain kewenangan khusus dan kapasitas implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi asimetris di Aceh masih menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan antara kewenangan dan kapasitas kelembagaan, kompleksitas koordinasi pemerintah pusat dan daerah, ketergantungan fiskal terhadap Dana Otonomi Khusus, serta dinamika politik lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewenangan khusus belum secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kemandirian fiskal, koordinasi pusat–daerah, serta transparansi dan akuntabilitas agar desentralisasi asimetris dapat berkontribusi secara optimal terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

Kata kunci: desentralisasi asimetris; otonomi khusus; Aceh; hubungan pusat–daerah; desentralisasi fiskal.

PENDAHULUAN

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan, kelembagaan, dan pengaturan yang berbeda kepada daerah tertentu sesuai dengan karakteristik historis, sosial, politik, budaya, dan geografisnya. Berbeda dengan desentralisasi simetris yang cenderung menerapkan pola kewenangan yang relatif seragam antardaerah, desentralisasi asimetris memberikan ruang bagi negara untuk merancang hubungan pusat–daerah secara lebih kontekstual. Dalam konteks Indonesia, penerapan

desentralisasi asimetris menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi keragaman daerah sekaligus menjaga integrasi nasional. Salah satu contoh paling menonjol adalah Provinsi Aceh yang memperoleh status kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan upaya membangun pemerintahan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh.

Penerapan desentralisasi asimetris di Aceh tidak hanya memberikan tambahan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga membentuk institusi dan mekanisme pemerintahan yang berbeda dari daerah lain. Kekhususan tersebut mencakup aspek kelembagaan, politik lokal, pengelolaan keuangan, penerapan syariat Islam, serta pengakuan terhadap karakteristik sosial dan budaya Aceh. Selain itu, Aceh memperoleh Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan daerah. Secara konseptual, berbagai bentuk kekhususan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, pemberian kewenangan yang lebih luas tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Desentralisasi asimetris justru menghadirkan sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara desain kebijakan dengan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh juga dapat menimbulkan persoalan koordinasi, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai pembagian kewenangan dan implementasi ketentuan kekhususan Aceh. Pada saat yang sama, pengelolaan Dana Otonomi Khusus menghadirkan tantangan tersendiri terkait efektivitas penggunaan anggaran, akuntabilitas, dan kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan sumber daya fiskal menjadi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selain persoalan kelembagaan dan fiskal, desentralisasi asimetris di Aceh juga menghadapi tantangan politik dan sosial. Penguatan institusi politik lokal, termasuk keberadaan partai politik lokal, menciptakan konfigurasi politik yang berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi tersebut dapat memperkuat representasi kepentingan lokal, tetapi sekaligus berpotensi menghasilkan fragmentasi kepentingan apabila tidak diimbangi dengan kapasitas koordinasi dan tata kelola yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi asimetris tidak cukup diukur

dari luasnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan institusi lokal mengelola kewenangan tersebut secara efektif, akuntabel, dan responsif.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis tantangan implementasi desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh, dengan menelaah dimensi kelembagaan, hubungan pusat–daerah, kapasitas fiskal, serta dinamika politik lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana desain desentralisasi asimetris mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan otonomi khusus di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis tantangan implementasi desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak semata-mata bertujuan mengukur tingkat keberhasilan desentralisasi secara kuantitatif, tetapi memahami secara mendalam bagaimana pengaturan kewenangan khusus di Aceh diimplementasikan, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlangsung, serta berbagai persoalan kelembagaan, fiskal, politik, dan sosial yang muncul dalam praktik. Aceh dipilih sebagai lokasi studi kasus karena merupakan salah satu daerah dengan bentuk desentralisasi asimetris yang memiliki karakteristik paling kompleks di Indonesia, baik dari aspek sejarah, kelembagaan pemerintahan, politik lokal, maupun pengelolaan keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, laporan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh, serta publikasi statistik yang relevan. Regulasi utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan kekhususan Aceh. Selain itu, penelitian menggunakan berbagai peraturan pemerintah, peraturan daerah Aceh, dokumen kebijakan pemerintah pusat, serta dokumen resmi Pemerintah Aceh untuk memahami perkembangan implementasi kewenangan khusus dan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Data juga diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan publikasi lembaga yang relevan dengan desentralisasi, otonomi khusus, hubungan pusat–daerah, pemerintahan Aceh, dan desentralisasi fiskal. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan

mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta kemampuan sumber dalam menjelaskan perkembangan dan persoalan desentralisasi asimetris di Aceh. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan periode dan tema untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik. Tahap pertama adalah identifikasi data yang berkaitan dengan desain dan bentuk kewenangan khusus Aceh. Tahap kedua mengelompokkan temuan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu (1) kelembagaan dan pembagian kewenangan, (2) hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, (3) desentralisasi fiskal dan Dana Otonomi Khusus, (4) dinamika politik lokal, dan (5) kapasitas pemerintahan serta pelayanan publik. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan desentralisasi asimetris dengan implementasinya di tingkat daerah. Analisis kemudian diarahkan untuk menemukan pola, hubungan antarfaktor, serta sumber utama tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.

Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari regulasi, dokumen pemerintah, publikasi akademik, dan laporan kelembagaan. Perbandingan antarsumber dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada satu perspektif sekaligus mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan informasi mengenai implementasi desentralisasi asimetris. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif desentralisasi dan hubungan pusat–daerah untuk menjelaskan mengapa pemberian kewenangan khusus tidak selalu menghasilkan efektivitas pemerintahan sebagaimana yang diharapkan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan institusional, fiskal, politik, dan administratif dalam penyelenggaraan desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris di Aceh merupakan desain kelembagaan yang secara normatif memberikan ruang kewenangan lebih luas kepada daerah, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan pada aspek kelembagaan, hubungan pusat–daerah, fiskal, dan politik. Pemberian status khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik historis, sosial, budaya, dan politik Aceh sekaligus menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, desentralisasi asimetris di Aceh tidak semata-mata merupakan

kebijakan administratif, tetapi juga instrumen politik untuk membangun kembali kepercayaan antara masyarakat Aceh dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Literatur mengenai otonomi khusus Aceh menunjukkan bahwa karakteristik tersebut membedakan Aceh dari daerah lain dalam hal kewenangan pemerintahan, kelembagaan politik, pengelolaan keuangan, serta pengakuan terhadap identitas lokal.

1. Kesenjangan antara desain kewenangan dan implementasi

Temuan pertama menunjukkan adanya kesenjangan antara desain formal desentralisasi asimetris dengan kapasitas implementasinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan berbagai kewenangan khusus kepada Aceh, tetapi sebagian kewenangan tersebut membutuhkan peraturan pelaksana, mekanisme koordinasi, dan pembagian kewenangan yang jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian terdahulu menemukan bahwa pada tahap awal implementasi, belum lengkapnya sejumlah peraturan pelaksana menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi khusus.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewenangan secara normatif belum cukup untuk menghasilkan desentralisasi yang efektif. Desentralisasi memerlukan kapasitas institusional untuk menerjemahkan kewenangan ke dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Dalam konteks Aceh, tantangan tersebut semakin kompleks karena terdapat lebih dari satu tingkat pemerintahan yang harus menjalankan kewenangan dalam kerangka otonomi khusus. Oleh sebab itu, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas desentralisasi asimetris.

2. Hubungan pusat–daerah dan munculnya problem koordinasi

Tantangan kedua berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Secara teoritis, desentralisasi asimetris memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk menentukan kebijakan sesuai karakteristik lokal. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut tetap berada dalam sistem pemerintahan negara kesatuan sehingga membutuhkan mekanisme koordinasi dan pengawasan antara pusat dan daerah. Persoalan muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai batas kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

Kondisi tersebut dapat menghasilkan apa yang dalam literatur disebut sebagai paradoks desentralisasi: daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama masih mengalami ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam aspek regulasi, fiskal, dan

pembinaan. Studi mengenai tata kelola Dana Otonomi Khusus Aceh bahkan menunjukkan adanya kecenderungan perubahan distribusi kewenangan yang dapat menghasilkan bentuk baru resentralisasi, terutama ketika pengambilan keputusan fiskal semakin terkonsentrasi pada tingkat tertentu. Dengan demikian, tantangan desentralisasi asimetris Aceh bukan hanya bagaimana memberikan kewenangan, tetapi bagaimana memastikan bahwa kewenangan tersebut benar-benar dapat digunakan secara efektif oleh institusi lokal.

3. Ketergantungan fiskal dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus

Dimensi fiskal menjadi salah satu tantangan paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi asimetris Aceh. Dana Otonomi Khusus dirancang sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, besarnya transfer fiskal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang proporsional. Penelitian mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus menunjukkan bahwa peningkatan dana belum selalu diikuti peningkatan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Persoalan transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan kualitas perencanaan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan dana tersebut.

Tantangan tersebut menjadi semakin strategis karena keberlanjutan Dana Otonomi Khusus menghadapi perubahan setelah periode kekhususan fiskal berakhir. Kajian terbaru menunjukkan bahwa ketergantungan Aceh terhadap Dana Otonomi Khusus masih tinggi dan berimplikasi terhadap kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, desentralisasi asimetris Aceh menghadapi dilema antara perluasan kewenangan dengan ketergantungan fiskal. Apabila sumber pembiayaan khusus berkurang sementara kapasitas Pendapatan Asli Daerah tidak meningkat secara signifikan, maka keberlanjutan berbagai program pembangunan yang selama ini didukung Dana Otonomi Khusus dapat menghadapi tekanan.

4. Dinamika politik lokal

Desentralisasi asimetris Aceh juga menghasilkan konfigurasi politik lokal yang berbeda dari daerah lainnya. Keberadaan partai politik lokal merupakan salah satu bentuk kekhususan yang dimaksudkan untuk memperkuat representasi kepentingan masyarakat Aceh dalam pemerintahan. Namun, kewenangan politik tersebut juga menghadirkan tantangan dalam bentuk kompetisi dan fragmentasi kepentingan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dinamika politik lokal dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dapat saling berinteraksi sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan dan implementasi pembangunan.

Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi asimetris tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pembagian kewenangan administratif. Desain kelembagaan yang memberikan ruang lebih besar kepada aktor lokal juga dapat mengubah distribusi kekuasaan. Apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai, kewenangan yang lebih luas berpotensi digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu, keberhasilan otonomi khusus membutuhkan institusi politik lokal yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat sekaligus mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

5. Implikasi terhadap efektivitas desentralisasi asimetris

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tantangan utama desentralisasi asimetris Aceh terletak pada ketidakseimbangan antara kewenangan, kapasitas, dan akuntabilitas. Aceh telah memperoleh kewenangan dan sumber daya yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas institusi lokal, kualitas hubungan pusat-daerah, tata kelola fiskal, dan dinamika politik lokal. Evaluasi terhadap implementasi otonomi khusus selama beberapa periode juga menunjukkan bahwa persoalan politik dan ekonomi masih menjadi faktor penting yang memengaruhi pencapaian tujuan kekhususan Aceh.

Dengan demikian, desentralisasi asimetris Aceh perlu diarahkan dari sekadar “pemberian kewenangan khusus” menuju “penguatan kapasitas untuk menggunakan kewenangan secara efektif.” Pemerintah pusat perlu memperjelas pembagian kewenangan dan memperkuat koordinasi tanpa mengurangi substansi otonomi. Pemerintah Aceh juga perlu meningkatkan kemandirian fiskal, kualitas perencanaan, transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dan kapasitas birokrasi. Pada saat yang sama, penguatan partisipasi masyarakat dan mekanisme akuntabilitas politik diperlukan agar kekhususan Aceh benar-benar menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih merata. Dalam perspektif tersebut, keberhasilan desentralisasi asimetris tidak seharusnya hanya dinilai dari luasnya kewenangan yang diberikan, tetapi dari kemampuan institusi daerah mengubah kewenangan tersebut menjadi pemerintahan yang efektif, pembangunan yang inklusif, dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris di Provinsi Aceh merupakan instrumen penting dalam mengakomodasi karakteristik historis, sosial, budaya, dan politik daerah sekaligus menjaga integrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan ruang

yang lebih luas bagi Aceh dalam mengatur pemerintahan, kehidupan politik, pengelolaan keuangan, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, implementasi desentralisasi asimetris masih menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi efektivitasnya.

Tantangan utama ditemukan pada kesenjangan antara kewenangan yang diberikan dengan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikannya, kompleksitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta ketergantungan fiskal terhadap Dana Otonomi Khusus. Selain itu, dinamika politik lokal dan belum optimalnya tata kelola sumber daya fiskal turut memengaruhi pencapaian tujuan otonomi khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang lebih luas tidak secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan pembangunan yang lebih baik.

Oleh karena itu, keberlanjutan desentralisasi asimetris di Aceh membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan birokrasi, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kemandirian fiskal, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Pemerintah pusat perlu membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan Pemerintah Aceh, sementara pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan kapasitas implementasinya. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi asimetris seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan luasnya kewenangan khusus yang dimiliki Aceh, tetapi berdasarkan kemampuan kewenangan tersebut menghasilkan pemerintahan yang efektif, pembangunan yang inklusif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqarni, W., Ghifari, M. S., Asemki, Y., Rizki, M., Safira, B., Nindiah, I., Rosa, M., Rahmi, N., Fadhil, R., & Wahyuni, W. (2022). Dynamics of asymmetric decentralization on the implementation of regional autonomy in Aceh. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 185–194. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.13769>
- Ali, S. Z. (2019). Model pengembangan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 159–170. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.159-170>
- Lubis, A. S., Yusuf, M. R., & Arysandi, D. N. (2025). Desentralisasi fiskal asimetris: Tinjauan terhadap relasi kemandirian fiskal dengan keberlanjutan Otsus Aceh. *Negara Hukum*:

- Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 16(1).
<https://doi.org/10.22212/jnh.v16i1.4700>
- Pribadi, M. A., & Regif, S. Y. (2022). The problem of alleviating the poor in the special autonomy governance of Aceh Province. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(2), 131–144. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.131-144>
- Safriansyah, R., & Mohd Ali, M. A. (2024). Decentralized fiscal governance and efforts for poverty reduction in Aceh, Indonesia. *Journal of Administrative Science*, 21(2), 91–117. <https://journal.uitm.edu.my/index.php/JAS/article/view/2060>
- Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh. *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Suharno. (2021). Aceh's special autonomy in the perspective of asymmetric decentralization policies. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 276–285. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.43607>
- Syahputra, I., & Baiduri, R. (2021). Eksistensi partai politik lokal pada era otonomi khusus Aceh. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 16(1). <https://doi.org/10.24114/jas.v16i1.20206>
- Tryatmoko, M. W. (2013). Problem demokratisasi dalam desentralisasi asimetris pasca-Orde Baru. *Masyarakat Indonesia*, 38(2). <https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.647>
- Utama, B. S. (2019). Asymmetric decentralization in Aceh: Institutionalization of conflict of interest by elites of GAM. *Jurnal Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.1018>